

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan konsep yang mendasar dalam sistem pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsep ini mengacu pada hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Tujuan dari konsep otonomi daerah adalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal mereka.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan daerah untuk mendanai program-program pembangunan dan layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada daerah melalui transfer dana dan sumber pendapatan lainnya. Namun penggunaan anggaran ini harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup> Iskandar Muda dkk., “*Factors of Quality of Financial Report of Local Government in Indonesia*,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (Maret 2018): 012067, doi:10.1088/1755-1315/126/1/012067.

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi landasan dalam penetapan anggaran dan pengelolaan APBD. Laporan ini mencerminkan posisi keuangan daerah, termasuk pendapatan, belanja dan aset yang dimiliki. Dengan informasi yang akurat dan terperinci yang terdapat dalam laporan keuangan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Laporan keuangan pemerintah berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang krusial bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pemahaman akan signifikansi laporan keuangan dalam konteks ini telah diperkuat oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dimana laporan keuangan yang berkualitas tinggi memiliki potensi untuk memberikan dampak besar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya di dalam sebuah organisasi.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti akurat, relevan, mudah dimengerti, dapat dibandingkan, disajikan tepat waktu dan dapat diverifikasi.

Informasi dalam laporan keuangan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan apa adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuhan dengan nilai rapor berakhlak dapat menjadi dasar kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki

---

<sup>3</sup> Twaha Kigongo Kaawaase dkk., “*Corporate Governance, Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality of Financial Institutions*,” *Asian Journal of Accounting Research* 6, no. 3 (7 September 2021): 348–66, doi:10.1108/AJAR-11-2020-0117.

kepentingan terkait informasi keuangan dalam laporan keuangan, nilai rapor berakhlak menandakan komitmen instansi tersebut terhadap prinsip-prinsip moral yang kuat.

Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung dalam meraih prestasi sebagai organisasi perangkat daerah dengan reputasi nilai orientasi pelayanan terbaik pada tahun 2023 dengan nilai 83,13% menandai adanya komitmen yang kokoh terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.<sup>4</sup> Dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Hal tersebut dapat meminimalkan risiko adanya kesalahan atau manipulasi dalam pelaporan keuangan. Sehingga pihak-pihak berkepentingan dapat dengan yakin menggunakan laporan keuangan sebagai panduan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menilai kinerja serta keadaan keuangan suatu instansi.

**Gambar 1. 1**  
**Rangking Perangkat Daerah**



Sumber: Bagian Organisasi Pemerintah Kabupateen Tulungagung<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, "Budaya Kerja Tulungagung," *Tulungagung BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan Akuntabel ompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif*, 2021, <https://berakhlak.tulungagung.go.id/read/detail/orientasi>. di akses 4 Mei 2024.

<sup>5</sup> "Budaya Kerja Tulungagung," diakses 5 Mei 2024,

Berikut ini merupakan nilai rapor berakhlak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 1.1**  
**Rapor Berakhlak DPMPTSP Kabupaten Tulungagung**

Indeks	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Keterangan
Berorientasi Pelayanan	54%	83,13%	Naik 29,13%
Akuntabel	60,16%	58,72%	Turun 1,44%
Kompeten	23,27%	27,2%	Naik 3,93%
Harmonis	77,5%	50%	Turun 27,5%
Loyal	35,27%	90,80%	Naik 55,53%
Adaptif	12,5%	40%	Naik 27,5%
Kolaboratif	23,5%	74,9%	Naik 51,4%

Sumber: Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung<sup>6</sup>

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa tingkat kompeten aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung tahun 2023 masih tergolong rendah meskipun terdapat peningkatan dari tahun 2022. Salah satu penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi ASN dalam rapor berakhlak yaitu Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). IP ASN menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas ASN berdasarkan faktor-faktor seperti kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

<https://berakhlak.tulungagung.go.id/read/detail/orientasi>.

<sup>6</sup> Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, "Budaya Kerja Tulungagung," *Tulungagung BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan Akuntabel ompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif*, 2021, <https://berakhlak.tulungagung.go.id/read/opd/210194> di akses 19 Desember 2023.

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.<sup>7</sup>

Tingkat kompeten yang rendah pada ASN dapat berdampak pada kinerja dan output yang dihasilkan oleh instansi, yang secara langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, faktor kedisiplinan yang rendah serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dapat menghambat pencapaian tujuan dan menyebabkan kesalahan atau ketidakpastian dalam menyajikan informasi finansial.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang cukup tentang praktik akuntansi yang relevan memainkan peran penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan. Mereka harus dapat mengaplikasikan standar akuntansi yang berlaku dengan tepat, melakukan analisis yang akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan peraturan yang mengatur sektor publik. Oleh karena itu, SDM yang kompeten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, semakin kompeten SDM, semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Antonia Jultri, dkk. membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>8</sup> Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Putri Alminanda Marfuah membuktikan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh secara signifikan

---

<sup>7</sup> Direktorat Jendral ASN Badan Kepegawaian Negara, "Buku Saku Digital (E-Book) Indeks Profesionalitas ASN," 2022, hal. 4, <https://www.bkn.go.id/layanan/pengukuran-indeks-profesionalitas-asn/>.

<sup>8</sup> Antonia Jultri, Anwar Made dan Doni Wirshandono Y., "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *New Public Management* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada BKAD Kabupaten Malang)," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 9, no. 1 (28 April 2021): Hal. 10, doi:10.21067/jrma.v9i1.5449.

terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>9</sup>

Proses penyusunan laporan keuangan sektor publik adalah tugas yang kompleks, yang memerlukan pemikiran kritis dan perhatian terhadap sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi kualitas dan relevansi informasi yang disajikan.<sup>10</sup> Beberapa hal mungkin bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan sektor publik, seperti penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penyusunan laporan keuangan sektor publik berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP memuat prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan di dalam organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, adanya perubahan dalam standar akuntansi pemerintah, seperti adopsi standar baru atau revisi standar yang ada, bisa memengaruhi cara laporan keuangan disusun dan disajikan. Penerapan SAP akan berdampak pada tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, karena SAP diimplementasikan di lingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bahkan sampai ke dinas-dinas yang ada dalam pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Sako dan Felmi D. Lantowa menunjukkan hasil bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

---

<sup>9</sup> Putri Alminanda dan Marfuah Marfuah, "Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16, no. 2 (30 Oktober 2018): hal. 130, doi:10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620.

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*, 1 ed. (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 181.

berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.<sup>11</sup>

Selain itu, teknologi informasi yang memadai dapat membantu dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah telah berkembang pesat. Ini mencakup penggunaan sistem informasi, perangkat lunak akuntansi dan aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya. Perangkat lunak akuntansi yang canggih, sistem manajemen basis data dan alat analisis data modern dapat mempermudah proses pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data keuangan. Pekerjaan manual seperti membuat laporan keuangan, sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan komputer dan aplikasi.

Dengan teknologi yang tepat, organisasi sektor publik dapat mengurangi kesalahan manusiawi, meningkatkan efisiensi dan memastikan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan. Penelitian yang dilakukan oleh Ikang Murapi menunjukkan hasil bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, semakin mudah dan cepat pula akses pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan.<sup>12</sup>

Organisasi dan pemerintahan harus menjaga keseimbangan antara SDM yang kompeten, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku

---

<sup>11</sup> Umar Sako dan Felmi D Lantowa, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo," *Journal of Accounting Science* 2, no. 1 (30 Januari 2018): hal. 53, doi:10.21070/jas.v2i1.1101.

<sup>12</sup> Ikang Murapi, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah," *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)* 1, no. 1 (31 Maret 2020): hal. 7, doi:10.30812/rekan.v1i1.660.

dan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang berkualitas. SDM yang kompeten, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, serta teknologi informasi yang memadai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan reputasi nilai orientasi pelayanan terbaik di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023. Mengacu pada hasil rapor berakhlak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dan beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang hasilnya belum konsisten serta minimnya penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami dan memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Dinas, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung”**.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diketahui bahwa kurangnya kedisiplinan serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan dan menyebabkan kesalahan atau ketidakpastian dalam menyajikan informasi finansial dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar dalam menetapkan anggaran dan mengelola APBD, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan yang bertanggungjawab. Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, termasuk tingkat kompetensi aparatur dinas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan kumpulan pertanyaan mengenai permasalahan dari latar belakang yang telah disampaikan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur dinas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah kompetensi aparatur dinas, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki target yang hendak dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur dinas terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur dinas, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi yang berharga. Selain itu, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mahasiswa, terutama dalam konteks pengaruh kompetensi aparatur dinas, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur dinas, penerapan standar akuntansi pemerintah dan investasi dalam teknologi informasi.

b. Bagi Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai dokumen akademik yang berfungsi sebagai acuan maupun referensi untuk pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa yang tertarik pada akuntansi, kompetensi SDM, dan teknologi informasi dalam konteks pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan keilmuan dalam meningkatkan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang bagaimana faktor tertentu seperti kompetensi pegawai, standar akuntansi dan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

## **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk menentukan tujuan penelitian agar lebih tepat dan sesuai dengan fokus penelitian yang akan dijelaskan oleh penulis. Oleh karena itu, batasan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Peneliti akan berfokus pada pengaruh kompetensi aparatur dinas, penggunaan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

2. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel (pengaruh kompetensi aparatur dinas, penggunaan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap kualitas laporan keuangan serta mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut.
3. Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang ditujukan kepada responden yang memahami akuntansi dan bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
4. Lingkup lokasi penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
5. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner dan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* IBM SPSS Statistic versi 29.

## **F. Penegasan Istilah**

Guna menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka perlu kiranya peneliti menjelaskan definisi dari sisi konseptual dan operasional.

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Kompetensi Aparatur Dinas**

Kompeten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “cakap (mengetahui)”.<sup>13</sup> Istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk ke

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring” (Kementerian

seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang memadai dalam bidang atau pekerjaan tertentu. Kompetensi aparatur dinas merupakan tingkat kecakapan pegawai dinas dalam melakukan tugas atau pekerjaan mereka.

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan menerapkan atau mempraktikkan.<sup>14</sup> Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses perencanaan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.<sup>15</sup> Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berarti proses penggunaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berperan dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang memiliki nilai dan kualitas yang tinggi.<sup>16</sup> Teknologi informasi melibatkan penggunaan komputer, *server*, *database*,

---

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses 7 September 2023.

<sup>14</sup> *ibid.*

<sup>15</sup> Irsan Lubis dan Suryani, *Akuntansi Instansi Pemerintah (Praktik Siklus Akuntansi & Pajak Satker)*, 2 ed. (Tangerang: STAPI Indonesia, 2018), hal. 2.

<sup>16</sup> Tri Rachmadi, *Pengantar Teknologi Informasi* (Bandar Lampung: Tiga Ebook, 2020), hal. 3.

perangkat *mobile* dan aplikasi untuk mengelola informasi secara efisien.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Catatan informasi finansial suatu entitas dalam jangka waktu tertentu, yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja entitas tersebut, dikenal sebagai laporan keuangan.<sup>17</sup> Laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

## 2. Definisi Operasional

Menurut pandangan peneliti, skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Dinas, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung” merupakan sebuah penelitian yang akan menguji pengaruh dari beberapa faktor yang diteliti terhadap kualitas dari laporan keuangan yang disusun oleh DPMPTSP Kabupaten Tulungagung.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dapat tersusun secara simetris dan terarah, maka penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan. Penelitian ini terdapat 6 bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Adapun penjelasan sistematika yang terdapat dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar

---

<sup>17</sup> Rapika Anwar, *Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, ed. oleh Sholehah (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021), hal. 21.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memuat uraian tentang kerangka teori yang didasarkan pada variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Pembahasan berisi paparan objek penelitian, deskripsi data dan analisis data dengan menggunakan beberapa metode analisis data.

Bab V Pembahasan berisi hasil analisis data yang dilakukan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.